Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Kewajiban Pemberian Informasi dalam Tindakan Vaksinasi Measles
Rubella (MR) pada Anak di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada
Nisrina Desyandini, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBERIAN INFORMASI DALAM TINDAKAN VAKSINASI *MEASLES RUBELLA* (MR) PADA ANAK DI RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

INTI SARI

Oleh:
Nisrina Desyandini[1], Ari Hernawan[2]

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan kewajiban pemberian informasi pada tindakan vaksinasi *Measles Rubella* (MR) untuk pasien anak di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, serta mengkaji secara mendalam implikasi hukum kedudukan anak sebagai subjek penerima pelayanan kesehatan terhadap peran orang tua atau wali dalam menerima informasi medis tersebut.

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data memadukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder serta penelitian lapangan melalui pedoman wawancara terstruktur kepada responden dan narasumber guna mendapatkan data primer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban pemberian informasi vaksinasi MR di RSA UGM secara formal telah dilakukan secara verbal, namun belum optimal secara substantif. Meskipun ketiadaan persetujuan tindakan dibenarkan oleh Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaan kewajiban informasi pada ayat (2) belum didukung oleh mekanisme standar dan instrumen dokumentasi yang memadai. Lebih lanjut, kedudukan anak yang belum dapat memahami informasi kesehatan secara mandiri berimplikasi pada pentingnya peran orang tua atau wali sebagai pihak yang mewakili kepentingan anak dalam menerima informasi medis. Belum terjaminnya pemahaman substantif orang tua melahirkan dua implikasi hukum, yakni tereduksinya pelindungan preventif bagi anak karena minimnya kapasitas mitigasi orang tua pasca-vaksinasi, serta rentannya akuntabilitas rumah sakit akibat ketiadaan parameter edukasi yang objektif untuk menjamin terpenuhinya asas kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*).

Kata kunci: Kewajiban Pemberian Informasi, Ketidakcakapan Bertindak, Perlindungan Anak, *Vaksinasi Measles Rubella*

[1] Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2] Dosen Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tinjauan Yuridis terhadap Pemenuhan Kewajiban Pemberian Informasi dalam Tindakan Vaksinasi Measles
Rubella (MR) pada Anak di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada
Nisrina Desyandini, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

JURIDICAL REVIEW ON THE FULFILLMENT OF THE OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION IN MEASLES RUBELLA (MR) VACCINATION FOR CHILDREN AT RUMAH SAKIT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

ABSTRACT

By:
Nisrina Desyandini[1], Ari Hernawan[2]

This legal writing aims to determine and analyze the fulfillment of the obligation to provide information in Measles Rubella (MR) vaccination for pediatric patients at Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, and to examine in depth the legal implications of the child's position as a recipient of health services on the role of parents or guardians in receiving such medical information.

The research was conducted using descriptive juridical-empirical research methods. The data collection technique combines literature research to obtain secondary data and field research through structured interview guidelines for respondents and resource persons to obtain primary data. The collected data is then analyzed qualitatively.

The results of this study conclude that the fulfillment of the obligation to provide information on MR vaccination at RSA UGM has formally been carried out verbally, but has not been substantively optimal. Although the absence of medical consent is justified by Article 295 paragraph (1) of the Law of The Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health, the implementation of the information obligation in paragraph (2) is not yet supported by standard mechanisms and adequate documentation instruments. Furthermore, the child's inability to independently understand health information emphasizes the importance of parents or guardians as parties representing the child's interests in receiving medical information. The lack of guaranteed substantive understanding of the parents creates two legal implications: the reduction of preventive protection for children due to the parents' limited post-vaccination mitigation capacity, and the vulnerability of the hospital's accountability due to the absence of objective educational parameters to guarantee the fulfillment of the best interests of the child.

Keywords: Obligation to Provide Information, Legal Incapacity, Child Protection, Measles Rubella Vaccination

[1] Student, Undergraduate Program in Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
[2] Lecturer, Department of Civil Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.